

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal dan Buku

Abady, A. P. (2013). Perencanaan Partisipasif Dalam Pembangunan Daerah. *Vol. III No. 1 April 2013*, 30.

Abdullah Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik Vol.11 No.01 2017*, 1-8.

Alam, A. S. (2009). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN SOSIAL DI PERKOTAAN SEBAGAI SEBUAH KAJIAN IMPLEMENTATIF. *Goverment : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 2 No.1 Januari 2009*, 84-86.

Alaslan, A. (2021). *Formulasi Kebijakan Publik : Studi Relokasi Pasar*. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas: CV. PENA PERSADA.

Arif Rahman Mahmoud, S. I. (2019). AKIBAT HUKUM TIDAK MEMBENTUK PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN. *Mulawarman Law Review Vol.4 Issue 1 Juni 2019*, 18.

Armando Soares, R. N. (2015). Peranan Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 2 2015*, 231-232.

Darwance, Y. W. (2021). POLITIK HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL. *Jurnal Of Political Issues*, Vol. 2 No 2, Januari 2021, 129-130.

Desrinelti Desrinelti, M. A. (2021). KEBIJAKAN PUBLIK : konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Vol. 6 No.1 2021*, 85-87.

Edward Endrianto Pandelaki, E. P. (2015). FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUK KINERJA SPASIAL RUMAH SUSUN KAITANNYA DENGAN KEPUASAN PENGHUNI. *Jurnal Modul Vol.15 No.2 Juli-Desember 2015*, 86-88.

Febriani, A. F. (2019). KEBIJAKAN KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN DI INDONESIA. *Lentera Hukum Vol.6 Issue 1 2019*, 19-20.

Ferinda Ardiyanti, T. R. (2019). EVALUASI PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA NGELOM KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO. *Ejournal.unesa.ac.id Vol.7 No.7 2019*, 2.

Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya Semarang.

Ibnu Sina Chandranegara, S. B. (2021). TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL. *Jurnal Ius Constituendum, Vol.6 No. 2 Oktober 2021*, 275-279.

Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.

Khaidir Nasution, A. F. (2022). PERSPEKTIF HUKUM PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS SERTIFIKAT HAK MILIK SATUAN RUMAH

SUSUN SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN.

Doktrina:Journal of Law, Vol.5 No 2 Oktober 2022, 240.

Kholik, S. (2020). PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 6 No. 1 - Juni 2020, 60-63.*

Luthfiah. (2010). PERUBAHAN BENTUK DAN FUNGSI HUNIAN PADA RUMAH SUSUN PASCA PENGHUNIAN. *Jurnal Ruang, Vol.2 No.2 September 2010, 34.*

Marzali, A. (2012). *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

MD, M. M. (1993). *Dasar dan struktur ketatanegaraan indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Mirza Hidayat, F. B. (2019). Redesain Rumah Susun tipe 54 di Kelurahan 24 ilir dan 26 ilir Palembang, penerapan green architecture pada bangunan dan kawasan. *Jurnal Arsitektur Pendapa Vol.2 No 1 , 46.*

Nazarudin, T. (2015). PERENCANAAN KOTA SECARA KOMPREHENSIF BERBASIS HUKUM INTEGRATIF MENUJU PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN. *Jurnal Cita Hukum, 214-215.*

Nurbuka, C. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Said, A. R. (2015). PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH DALAM OTONOMI SELUAS-LUASNYA

MENURUT UUD 1945. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No.4 Oktober-Desember 2015*, 580-583.

Sanusi, B. (2004). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sholih Muadi, I. M. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik, Volume 06, Nomor 02, Desember 2016*, 197-199.

Sudjaipul, R. (2004). *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*. Jakarta: Pancar Suwuh.

Suhaeni, H. (2009). PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DALAM Mendukung Aktivitas Ekonomi Perkotaan. *Jurnal Permukiman Vol.4 No 2*, 102-103.

Taufiqurokhman, S. M. (2014). *Kebijakan Publik* . Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Moestopo Beragama (pers).

Widyandini, W. (2012). HAKEKAT RUMAH PADA PERENCANAAN RUMAH SUSUN. *Teodolita Vol.13 No.1 Juni 2012*, 33-36.

Wilko Rahmad Zulkarnaini, E. D. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG Mempengaruhi Permukiman Kumuh Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Planologi, Vol. 16 No. 2 Oktober 2019*, 174-175.

B. Internet dan Referensi lain

Dikutip dari (<https://peraturan.bpk.go.id/>)

Dikutip dari (<https://disperkim.sumselprov.go.id/>)

Dikutip dari (<http://repository.radenfatah.ac.id>, pada tanggal 10 Maret 2023 jam 14:08

Dikutip dari (*sumber data: laporan pengelolaan rusunawa kasnariansyah dan kertapati per-februari 2023 dinas perkimtan*)

C. Wawancara

Wawancara pada Ibu Yunita, S.T M.T. (Staff Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Kota Palembang). Pada tanggal 30 Mei 2023

Wawancara pada Bapak Ahmad Haris Yudiansyah, S.T (Staff Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Kota Palembang) pada tanggal 30 Mei 2023